



LAPORAN DELEGASI DPR RI

296TH EXECUTIVE COMMITTEE MEETING OF THE IPU

28 Juni - 1 Juli 2025, Athena - Yunani



**THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

The background of the cover is a photograph of the Tugu Pahlawan (Heroes Monument) in Jakarta, Indonesia. The monument is a large, dark, abstract sculpture made of concrete, featuring a central vertical pillar and several horizontal, curved arches. In the foreground, there is a green lawn with blue arrows pointing in various directions. To the right, a large white circular graphic overlay contains the title and date of the report.

**LAPORAN
DELEGASI DPR RI
THE 69TH SESSION
OF THE COMMISSION
ON THE STATUS OF
WOMEN**

9-14 Maret 2025
New York - Amerika Serikat



RAPAT KOMITE EKSEKUTIF IPU
28 JUNI-5 JULI 2025 (ATHENA, YUNANI)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inter-Parliamentary Union (IPU) merupakan organisasi parlemen global yang beranggotakan 180 parlemen negara. Forum tertinggi IPU adalah IPU General Assembly atau Sidang Umum IPU.

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera yang juga merupakan Anggota Komite Eksekutif IPU (wakil dari Asia Pacific Group/APG) mendapat undangan langsung dari IPU untuk menghadiri rapat Komite Eksekutif IPU yang ke-296 pada tanggal 28 Juni 2025 di Athena, Yunani. Rapat tersebut akan dipimpin oleh Presiden IPU, Dr. Tulia Ackson.

B. Partisipasi DPR RI pada Sidang-Sidang Parlemen Dunia

Kehadiran dan partisipasi DPR RI rapat komite eksekutif IPU, merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang yang mengatur terkait diplomasi parlemen, termasuk Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau biasa disebut UU MD3, yang menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang diantara lainnya untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menegaskan bahwa tiga fungsi DPR RI, yaitu pengawasan, penganggaran, legislasi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam

melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai Alat Kelengkapan DPR RI diberi mandat untuk menjalankan diplomasi parlemen. Sesuai dengan Pasal 116 UU MD3 dan Pasal 82 Tata Tertib DPR RI Tahun 2020, tugas BKSAP antara lain: membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen.

BKSAP merupakan focal point diplomasi parlemen DPR RI dalam berbagai forum internasional termasuk Sidang Umum IPU. BKSAP DPR RI telah secara rutin mengirimkan delegasi di Sidang Umum IPU yang diselenggarakan dua kali dalam satu tahun. Pada Sidang Umum IPU ke-148 kali ini, DPR RI selalu berprinsip untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan menjalankan misi untuk turut serta membahas berbagai tantangan dunia termasuk perdamaian seperti mandat UUD 1945. Selain itu, keikutsertaan DPR RI dalam sidang tersebut juga bagian dari upaya untuk memelihara hubungan bilateral dan multilateral dengan parlemen Anggota IPU dan berbagai organisasi internasional yang hadir.

C. Tujuan dan Urgensi Kegiatan

- 1.** Berpartisipasi aktif dalam forum parlemen dunia (IPU) sesuai mandat diplomasi parlemen;
- 2.** Penguatan peran diplomasi parlemen Indonesia di forum internasional;
- 3.** Mengembangkan strategi bersama untuk implementasi resolusi-resolusi yang telah diadopsi, dan memecahkan tantangan global.
- 4.** Memperoleh gambaran strategis untuk mengukur hambatan dan peluang.

D. Visi Misi

Adapun misi delegasi BKSAP DPR RI menghadiri agenda tersebut adalah:

1. Berkontribusi aktif untuk menyoroti langkah-langkah konkrit yang dapat dilakukan parlemen untuk mencapai tujuan-tujuan dalam meningkatkan tata kelola pemerintah.
2. Memperkuat peran parlemen dalam fungsi pengawasan dan keterwakilan atas tindakan pemerintah serta pertukaran praktik legislatif terbaik mengenai pembangunan berkelanjutan dari parlemen di seluruh dunia.

E. Susunan Delegasi

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Dr. Mardani Ali Sera	F. P-PKS	Ketua BKSAP / Ketua Delegasi

F. Dasar Pengiriman Delegasi

Pengiriman Delegasi BKSAP DPR RI ke rapat komite eksekutif IPU berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/KU.05.05/KSOI/ST/6/2025/2025

G. Persiapan Pengiriman Delegasi

Serangkaian persiapan telah dilakukan dalam menghadiri rapat komite eksekutif IPU ini. Setelah Pimpinan DPR RI memberikan persetujuannya untuk mengirim delegasi, dilanjutkan dengan mengadakan rapat Delegasi. Bahan-bahan masukan dan poin intervensi mendapatkan masukan dari Kementerian Luar Negeri.

II. Lapoaran Kegiatan

A. Agenda

Agenda Rapat ke-296 Komite Eksekutif IPU

WAKTU	AGENDA
Saturday, 28 June, 2025	
Arrival of delegates	
15:00	Gather at Athens International Airport Eleftherios Venizelos Airport (ATH). Depending on arrival times, group transfers will be arranged – exact meeting point to be confirmed. Direct transfer to Olympia and the hotel Aldemar Olympian Village (Estimated arrival 19:00 – travel time about 3.5 hours)
21:30	Welcome reception and light dinner at the hotel (Aldemar Olympian Village)
Sunday, 29 June, 2025	
09:30-12:30	Meeting of the Executive Committee
12:30-14:00	Lunch
14:00-17:00	Continuation of the meeting of the Executive Committee
21:00-23:00	Gala Dinner
Monday, 30 June 2025	
09:30	Departure from the hotel
10:00-11:00	Guided tour of Museum of Ancient Olympia
11:00-13:00	Celebrations to mark the International Day of Parliamentarism and the 136th anniversary of the IPU <i>Venue: International Olympic Academy in Olympia</i>
13:00	Lunch: <i>Venue to be confirmed</i>
20:30	Dinner: <i>Venue to be confirmed</i>
Tuesday, 1 July 2025	
09:30	Departure for the Hellenic Parliament in Athens
13:00	Arrival at the Hellenic Parliament

13:30	Meeting with the President of Parliament, Mr. Nikitas Kaklamanis, and the members of the national IPU delegation Guided tour of the Parliament
14:30	Official lunch hosted by the President of the Parliament (<i>Venue to be confirmed</i>)
16:00	Departure of delegates for the Athens International Airport (Eleftherios Venizelos)

B. Jalannya pertemuan

Pertemuan Komite Eksekutif IPU ke-296 berlangsung di Olympia pada Minggu, 29 Juni 2025 di Aldemar Olympian Village Resort, Yunani. Pertemuan tersebut diikuti anggota Komite Eksekutif IPU sebagai berikut:

1.	Hon. Ms. Gabriela Morawska Stanecka (Polandia) – Vice President of the Executive Committee;
2.	Hon. Ms. Sevil Mikayilova (Azerbaijan) – Vice President of the Executive Committee;
3.	H.E. Ms. Nelly Butete Kashumba Mutti (Zambia/Speaker of the House of Representatives) – Vice President of the Executive Committee (<i>online participation</i>);
4.	Hon. Ms. Dionysia-Theodora Avgerinopoulou (Yunani) – tuan rumah pertemuan;
5.	H.E. Mr. Milton Dick (Australia/Speaker of the House of Representatives);
6.	H.E. Mr. Godswill Obot Akpabio (Nigeria/President of the Senate);
7.	H.E. Dr. Hamda bint Hassan Al-Sulaiti (Qatar/Deputy Speaker Shura Council));
8.	H.E. Mr. Mr. Xavier Iacovelli (Prancis/Vice President of the Senate);
9.	Hon. Dr. Mardani Ali Sera (Indonesia);
10.	Hon. Mr. Abderrahmane Qanshouba (Aljazair);
11.	Hon. Ms. Nour Abu Ghoush (Yordania);

12.	Hon. Mr. Agustín Almodóbar Barceló (Spanyol).
-----	---

Adapun berikut adalah rangkuman jalannya pertemuan Komite Eksekutif IPU ke-296 dan agenda dimaksud.

1. *Approval of the summary record of the third sitting of the 295th session of the Executive Committee on 3 and 4 April 2025;*

Agenda membahas ringkasan pertemuan sesi sebelumnya yang dihelat di sela-sela pelaksanaan IPU Assembly ke-150 di Uzbekistan, April 2025. Peserta menyetujui ringkasan pertemuan dimaksud.



Suasana pertemuan komite eksekutif IPU ke-296 di Olympia, Yunani. Dok: BKSAP

2. *Matters arising*

Sekretaris Jenderal IPU, Martin Chungong, menyampaikan beberapa hal yang muncul dari apa yang telah disimpulkan pada sesi Komite Eksekutif ke-295 dan konsekuensi dari kesepakatan yang sebelumnya diambil. Beberapa diantaranya yakni mengenai mekanisme IPU untuk situasi krisis, pembahasan status parlemen Venezuela, amendemen statuta IPU akan menjadi subyek pembahasan di agenda berikutnya.

3. Overview of IPU mechanisms that deal with crisis situations

Sekretaris Jenderal IPU, Martin Chungong menjelaskan beberapa hal terkait mekanisme di IPU yang berkaitan dengan penanganan situasi krisis.

IPU memiliki beberapa mekanisme dalam kerja-kerjanya di area pencegahan konflik, pembangunan perdamaian, mediasi, respon kemanusiaan dan pengembalian ke tertib konstitusi.



Sekjen IPU Martin Chungong saat memimpin rapat komite eksekutif IPU. Dok: BKSAP

Diskusi ini muncul sebagai respon dari pertemuan sebelumnya yang mengkhawatirkan adanya peningkatan pembentukan komite, sub-komite untuk mengatasi isu-isu spesifik yang berpotensi tumpang tindih dengan alat kelengkapan yang sudah ada. Ada usulan untuk membahas mengenai perlunya jangka waktu kerja untuk komite yang bersifat ad-hoc, ataupun mengkaji ulang keberadaan mekanisme yang sudah ada di IPU.

Mekanisme *pertama* yakni **mekanisme politik**, yang fokus pada pernyataan, rekomendasi, hingga komitmen melalui resolusi-resolusi yang diadopsi IPU pada masing-masing komite, ataupun sarana emergency item. Tiga komite tetap IPU (Peace and International Security; Sustainable Development;

Democracy and Human Rights) menghasilkan resolusi. Sementara Komite Tetap untuk Urusan PBB menghasilkan mosi.

Mekanisme *kedua* melalui **mekanisme kelembagaan**, yakni seperti upaya mediasi dan diplomasi melalui kepemimpinan IPU (Presiden IPU dan Sekjen); badan tertentu (*dedicated bodies*) yakni Komite Isu Timur Tengah, Grup Fasilitator untuk Siprus, Satuan Tugas IPU untuk resolusi damai perang di Ukraina; badan khusus (*specialized bodies*) seperti Komite IHL, Kelompok Saran Tingkat Tinggi untuk Mengatasi Terorisme dan Ekstrimis Keras, Kelompok Kerja untuk Sains dan Teknologi, Komite HAM Anggota Parlemen. Forum Anggota Parlemen Muda dan Forum Anggota Parlemen Perempuan juga memberi perspektif tambahan terhadap resolusi-resolusi yang dihasilkan.

Mekanisme selanjutnya adalah melalui **mekanisme programatik**, yang diwujudkan melalui kampanye peningkatan pemahaman, dukungan pelatihan dan teknis, dan pengembangan perangkat praktis.

Mekanisme programatik ini utamanya ditujukan untuk perlucutan senjata, rekonsiliasi dan pencegahan konflik, mengatasi terorisme dan mencegah ekstrimis garis keras, respon atas tantangan lintas sektor dalam perdamaian. Hal-hal yang mewujudkan dalam mekanisme ini seperti contoh legislasi, peta interaktif untuk legislasi isu terkait, jaringan parlemen global, pengawasan kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa, dan lainnya.



Dr. Hamda bint Hassan Al-Sulaiti Qatar/Deputy Speaker Shura Council menyampaikan pandangannya terkait geopolitik dan mekanisme krisis. Dok: BKSAP

Dalam diskusi, Delegasi Qatar menyatakan perlunya IPU melibatkan seluruh kelompok geopolitik dalam mekanisme krisis. Qatar juga menekankan negaranya memiliki pusat dialog antarkeyakinan, menurutnya hal tersebut dapat diberdayakan lebih lanjut.

Delegasi Yunani menekankan perlunya Komite Eksekutif untuk mendengarkan pakar-pakar dalam isu penyelesaian sengketa dan konflik. Ia mengusulkan IPU mendedikasikan dua hari diskusi untuk mendalami mekanisme-mekanisme yang ada dengan mendengar paparan para pakar. Ia juga menyarankan agar badan-badan IPU lainnya tidak hanya bertemu biasa saja saat IPU Assembly. Mereka dapat bekerja di luar waktu Assembly dan di luar pertemuan reguler. Delegasi Polandia setuju dengan usul Yunani.

Delegasi Zambia menyarankan agar IPU dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah ketegangan yang ada di dunia.

Delegasi Indonesia menekankan pentingnya pula untuk berkonsentrasi mengatasi akar masalah seiring dengan semakin meningkatnya titik konflik dan ketegangan di berbagai belahan dunia. konflik seperti Gaza dan Palestina, titik konflik di Timur Tengah maupun situasi rentan di kawasan Afrika, perlu dilihat dalam skema yang lebih luas dengan menangani permasalahan di hilir tidak hanya di hulu.

Beberapa indikator seperti Indeks Demokrasi yang diluncurkan oleh The Economist Intelligence Unit yang menunjukkan penurunan kualitas demokrasi global hingga hanya 17% dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang sesuai jalur untuk tercapai pada 2030 dan adanya peningkatan konflik menunjukkan relasi signifikan dari situasi pembangunan dengan sikap bermusuhan. Ia mendorong agar IPU memiliki mekanisme yang jelas pula agar dapat mempercepat pencapaian SDGs.

Delegasi Azerbaijan mengusulkan perlunya IPU untuk bekerjasama lebih dalam dengan PBB untuk mengatasi akar masalah konflik. Delegasi Yordania sebagai perwakilan Parlemen Muda IPU mengusulkan agar masing-masing parlemen memiliki unit krisis internasional yang dapat berkolaborasi dan bekerjasama dengan IPU saat situasi krisis terjadi.

Delegasi Australia menyatakan struktur IPU yang ada saat ini dapat diperkuat dengan kehati-hatian dalam aspek penggunaan sumber daya.

Delegasi Qatar dalam pertemuan sesi siang menekankan perlunya IPU menyikapi situasi terakhir yang terjadi di Timur Tengah, terutama ketika Iran melakukan serangan ke Al-Ubeid, Qatar. Qatar menekankan organisasi

antarpemerintah lainnya telah mengeluarkan pernyataan, sementara IPU tidak bersikap.

Delegasi Aljazair menekankan pentingnya Komite Eksekutif mempertimbangkan perubahan statuta agar IPU dapat mengeluarkan pernyataan segera dalam menyikapi situasi krisis. Sementara Delegasi Nigeria menekankan urgensi menyatakan sikap dan merekomendasikan langkah untuk misi lapangan yang dapat dilakukan oleh Komite Urusan Timur Tengah.



Delegasi Parlemen Aljazair dalam rapat Excom menekankan pentingnya perubahan Statuta IPU.

Dok: BKSAP

Sekretaris Jenderal IPU menguraikan posisi lembaga yang harus hati-hati, mengingat situasi krisis telah mereda ditandai dengan gencatan senjata antara Iran dan Israel. IPU perlu untuk tidak gegabah dan malah membuka kotak pandora.

Delegasi Indonesia menyepakati untuk tidak gegabah. Kendati demikian menekankan pentingnya mekanisme di IPU untuk bersikap, seperti melalui *Leadership Statement*.

Sekjen IPU merekomendasikan agar Komite Eksekutif mencatat krisis di Timur Tengah dan merekomendasi Pimpinan IPU untuk menerbitkan *Leadership Statement* (Presiden dan Sekjen IPU), dengan catatan menunggu respon dari Presiden IPU, sekaligus merujuk situasi dimaksud ke Komite Urusan Timur Tengah. Rekomendasi tersebut disepakati oleh para anggota.

Sekjen IPU juga menyampaikan komitmennya agar IPU dapat semakin inklusif dalam proses kerja parlemen. Di sisi lain ia mengusulkan adanya *IPU Group of Eminent Personalities* yang terdiri dari tokoh-tokoh berpengaruh IPU seperti mantan Presiden IPU, anggota Komite Eksekutif dan lainnya. Dengan pertimbangan redundansi dan kerumitan struktur, usulan tersebut ditolak oleh anggota Komite Eksekutif.

4. *Situation of certain parliaments: Niger and Venezuela*

Agenda ini membahas situasi keanggotaan dua parlemen yakni Niger dan Venezuela dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Parlemen Nigeria

- Pascakudeta militer dipimpin oleh Jenderal Abdourahamane Tiani, Juli 2023, Parlemen dibubarkan. Kudeta yang menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum itu dikecam The Economic Community of West African States (ECOWAS).
- Junta mengumumkan masa transisi tiga tahun dan ditolak ECOWAS.
- Pada Agustus 2023, Uni Afrika menangguhkan keanggotaan Niger.
- Pada Agustus 2023, junta menyampaikan kepada IPU mengenai niatan negara tersebut untuk membentuk Dewan Konsultatif untuk Transisi (Consultative Council of the Transition/CCN) pada kuartal pertama 2024.
- Pada September 2023, Burkina Faso, Mali, dan Niger membentuk aliansi negara Sahel (Alliance of Sahel States Alliance des États du Sahel) atau AES untuk merespon risiko tindakan militer dari ECOWAS pascakudeta di Niger.
- AES mengumumkan pada Juli 2024 rencana pembentukan parlemen AES. Pada Januari 2025, negara anggota AES resmi mundur dari ECOWAS. AES juga memperkenalkan paspor bersama.

- Pada Februari 2025, junta mengumumkan akan membentuk kelembagaan transisi termasuk parlemen dengan masa transisi minimum lima tahun dan dapat diperpanjang.
- IPU pada April 2025 atas rekomendasi Komite Eksekutif dan disetujui Governing Council, keanggotaan Parlemen Niger ditangguhkan dengan justifikasi tidak adanya parlemen transisi sejauh ini.
- Pascasidang umum IPU ke-150, junta militer membentuk Council of the Refoundation (CCR) berdasarkan mandat dari Pasal 68 Piagam Refoundation Niger (konstitusi transisi). Pada 8 Mei 2025, Ketua CCR Mamoudou Harouna Djingarey ditetapkan oleh Jenderal Tiani. Ketua CCR telah bersurat ke IPU menginformasikan keanggotaan baru CCR dan meminta dukungan IPU terhadap keanggotaan baru tersebut.
- Parlemen Niger memiliki tunggakan iuran keanggotaan sejak 2021 senilai CHF 21.752 (sekira Rp 437 juta). Namun sesuai aturan keuangan IPU tunggakan tersebut dihapus karena keanggotaan Niger telah ditangguhkan.



H.E. Mr. Godswill Obot Akpabio President of the Senate Nigeria yang hadir dalam rapat excom IPU.

Dok: BKSAP

Sekjen IPU menyatakan dengan situasi Niger dimaksud, Ketua CCR berharap keanggotaan mereka akan dapat diaktifkan kembali di IPU. Sekjen juga menginformasikan Ketua CCR, Mamoudou Harouna Djingarey, sudah bersiap untuk berdiskusi secara *online* saat itu juga dengan seluruh anggota Komite Eksekutif.

Dalam diskusi, Ketua CCR menginformasikan perkembangan CCR dan bagaimana mereka berupaya untuk mengisi keanggotaan seinklusif mungkin sekaligus mempertimbangkan keterwakilan perempuan sebanyak 30%.



Ketua BKSAP DPR RI Dr. Mardani Ali Sera saat mengikuti rapat excom IPU. Dok: BKSAP

Pascadiskusi, Delegasi Indonesia ingin mengetahui lebih lanjut apakah jalur komunikasi informasi yang diterima IPU hanya berasal dari CCR. Ia mengapresiasi keterlibatan konstruktif Sekretariat IPU di CCR Niger, tetapi juga menekankan pentingnya memiliki informasi dari sisi lain yang memungkinkan pengambilan keputusan dapat lebih komprehensif.

Usul tersebut direspon positif oleh Australia dengan penekanan pandangan serupa mengenai informasi yang lebih komprehensif. Delegasi Yordania menyampaikan aktivasi kembali Parlemen Niger ke IPU dapat dilakukan apabila IPU telah dapat mengetahui secara lebih dalam mengenai peta jalan lima tahun Niger dalam perkembangan demokrasi mereka ke depan dan rencana CCR menjadi parlemen yang representatif.

Delegasi Nigeria menyarankan Komite Eksekutif untuk mendukung masuknya Parlemen Niger kembali ke IPU.

Dalam isu tersebut, Sekjen IPU menyimpulkan tidak adanya pertentangan terkait rencana pengaktifan kembali Parlemen Niger sebagai anggota IPU, namun anggota Komite Eksekutif memerlukan waktu lebih lama untuk menelaah segala informasi terkait. Komite Eksekutif menyepakati pembahasan reaktivasi keanggotaan Parlemen Niger akan kembali dilakukan pada Oktober 2025.

Parlemen Venezuela

- Pembahasan situasi Parlemen Venezuela telah berlangsung beberapa kali seiring dengan rencana Venezuela mengadakan Pemilu pada Mei 2025.
- IPU sejak 2021 tidak mengakui Parlemen Venezuela baik yang dibentuk sejak 2015 (yang terpilih tapi tidak diakui Maduro), maupun Parlemen yang dibentuk pada 2021 (dan diboikot oleh oposisi).
- Pada Juli 2024, Presiden Maduro memenangi Pemilu lagi dan dipertanyakan oleh oposisi serta dunia.
- Pada Januari 2025, Presiden Maduro mengambil sumpah jabatan untuk ketiga kalinya.
- Hasil Pemilu memenangkan koalisi partai presiden Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, dengan 256 dari 285 kursi parlemen. Oposisi melalui sepuluh koalisi lainnya memenangkan 29 kursi parlemen. Tokoh oposisi terkemuka dan salah satu kandidat presiden Henrique Capriles terpilih masuk ke parlemen.
- Pemilu juga terjadi di kawasan sengketa Venezuela dengan Guyana yakni di Guayana Esequiba, kendati telah dilarang oleh International Court of Justice (ICJ).
- Sejumlah insiden Pemilu terjadi seperti minimnya pemilih dan banyaknya anggota militer di tempat pemungutan suara, dan penangkapan 70 individu dengan tuduhan berbagai macam, menjelang Pemilu.
- Keputusan Komite Eksekutif IPU pada pertemuan IPU ke-150 adalah untuk mempertimbangkan status keanggotaan Parlemen Venezuela pascapelaksanaan Pemilu.
- Tagihan tunggakan Parlemen Venezuela mencapai CHF 736.700 (sekira Rp 14,7 miliar).

Dalam pembahasan situasi Parlemen Venezuela, Delegasi Spanyol menyarankan IPU untuk bertemu dengan Presiden sah Venezuela yang berada di pengasingan di Spanyol. Menurut Delegasi Spanyol, banyak terjadi pelanggaran Pemilu di Venezuela, termasuk ditolaknya pengamat Pemilu dari Spanyol.

Merespon pembahasan, Sekjen menyarankan agar Komite Eksekutif kembali memonitor situasi dan keterlibatan tanpa mereposisi status keanggotaan Parlemen Venezuela hingga Januari 2026 (waktu parlemen baru Venezuela bersidang kali pertama).

5. *Amendments to and implementation of the IPU Statutes and Rules*

IPU memiliki Kelompok Kerja untuk Amendemen Statuta dan Peraturan IPU yang dibentuk sejak Maret 2024. Hasil Kelompok Kerja yang telah mengkaji beragam usulan dari anggota IPU, grup geopolitik, hingga alat kelengkapan IPU lainnya, telah diramu menjadi dua usulan amendemen yang disepakati pada Oktober 2024 dan April 2025.



Suasana rapat excom IPU. Dok: BKSAP

Beberapa amendemen yang disepakati antara lain sebagai berikut:

- Gender – penguatan keseimbangan dan paritas gender. Masuknya aturan untuk paritas gender antara Presiden dan Wakil Presiden dari Komite Tetap.

- Partisipasi pemuda – Kategori usia parlemen muda di IPU turun dari 45 ke 40. Aturan terkait diakomodasinya perspektif anggota parlemen muda dalam resolusi.
- Keragaman – Aturan untuk keragaman anggota delegasi tercermin dalam informasi persidangan.
- Tata Kelola IPU – penguatan Dewan Pengarah Majelis IPU dan formalisasi pertemuan Ketua Grup Geopolitik, Presiden Komite Tetap, dan Presiden badan-badan IPU lainnya.
- Akuntabilitas – Terbentuknya Komite Etik dan Pengawasan. Peran Governing Council dalam mengadopsi dan mengawasi strategi IPU diperjelas.

Beberapa isu tambahan yang tengah dalam diskusi antara lain sebagai berikut:

- Pengklarifikasian pengamat non-voting. Usulan amendemen untuk 151st IPU Assembly sebagai berikut:

Article 4.2 of the Statutes

*When a Member Parliament of the IPU has ceased to function as such, the Executive Committee shall consider the situation and express an opinion to the Governing Council. The Governing Council shall take a decision on the suspension of the affiliation of that Member Parliament to the IPU. **If the Governing Council decides not to suspend the affiliation of the Member Parliament, it may exceptionally take a decision to allow a parliamentary entity to participate in the IPU as the country's legitimate interlocutor, in a non-voting observer capacity. In such a case, any arrears of contributions owed by that Member Parliament shall be written off and the assessment of future financial contributions shall be suspended until such time as a parliament is re-established in the country in accordance with Article 3.1.***

- Perubahan komposisi keanggotaan Komite HAM Anggota Parlemen (dari 10 ke 12 orang, adil berbasis grup geopolitik. Afrika dan Twelve Plus mendapat jatah tiga orang, Asia Pasifik dan GRULAC mendapat jatah dua orang, Aran dan Eurasia masing-masing satu orang).

Pasal lanjutan (Rule 1.4):

The Committee as a whole should be gender-balanced and in principle comprise five six men and five six women. In any case, there shall be no fewer than four members of either sex.

- Perubahan mandat dan komposisi Komite Urusan Timur Tengah, yang berdasarkan resolusi IPU tentang the role of parliaments in advancing the two-State solution in Palestine (disepakati di IPU ke-150), memberi mandat agar Komite Urusan Timur Tengah menjadi Satuan Tugas Strategis tentang Timur Tengah (yang lebih fokus ke isu Palestina dan Israel). Komite Urusan Timur Tengah akan kembali mendiskusikan hal tersebut pada pertemuan di IPU ke-151.
- Usulan tambahan amendemen dari Biro Parlemen Perempuan terkait kuota perempuan dalam delegasi dan sanksi untuk delegasi yang tidak mematuhi ketentuan dimaksud.
- Dalam hal resolusi darurat (emergency item), beberapa hal ditekankan yakni terkait hal terkini dengan aksi darurat oleh komunitas internasional diperlukan. IPU akan menyusun panduan pengajuan rancangan resolusi darurat (emergency item).

Delegasi Qatar mengatakan perlunya pendalaman usulan amendemen lebih lanjut khususnya dalam hal kuota parlemen Perempuan dalam delegasi, karena bisa saja beberapa parlemen tidak dapat memenuhi komposisi keanggotaan dimaksud.

Sekretariat IPU mengungkapkan, usulan dari Biro Parlemen Perempuan hanya merupakan aspirasi seiring dengan meningkatnya pemahaman mengenai komposisi parlemen yang bisa saja belum sesuai dengan jumlah representasi perempuan yang diharapkan bila ada kuota Perempuan dalam delegasi IPU.

6. IPU Code of Conduct and Anti-Harassment Policy

Sekretaris Jenderal IPU menerangkan sesuai persetujuan para anggota, IPU telah memiliki Kebijakan Anti Pelecehan dan Tata Berperilaku. Kedua dokumen tersebut mengatur situasi bagi anggota IPU dan juga pemilik jabatan IPU. Sekjen dan pegawai IPU terikat Kode Berperilaku dari pegawai IPU. Kebijakan-kebijakan tersebut akan disampaikan pada sesi khusus pada IPU Assembly, Oktober mendatang.

7. *Sixth World Conference of Speakers of Parliament*

Sekjen IPU menyampaikan perkembangan terkini persiapan penyelenggaraan Sixth World Conference of Speakers of Parliament, 29-31 Juli di Jenewa, Swiss. Komite Persiapan akan bertemu pada 4 Juli untuk mengkaji masukan-masukan dari dokumen luaran (*outcome document*).

Dalam konferensi, Sekjen menerangkan ada sesi inovatif yang membuka ruang Ketua Parlemen bersua dengan entitas lain seperti organisasi masyarakat sipil internasional. IPU juga akan menghadirkan satu tokoh terkenal, aktor Hollywood Michael Douglas, yang berperan sebagai UN Messenger of Peace. Per 29 Juni 2025, jumlah peserta yang sudah konfirmasi hadir adalah 43 Ketua Parlemen dan Sekretariat memperkirakan jumlah akan bertambah dalam beberapa hari ke depan.



Foto bersama delegasi Excom IPU. Dok: BKSAP

8. *IPU Strategy*

Sekretariat IPU menyampaikan mengenai rencana penyusunan panduan strategi lima tahunan 2027-2031. Sebagai informasi IPU telah memiliki panduan strategi lima tahunan yang akan rampung pada 2026 (2022-2026). Saat ini IPU tengah dalam proses menyusun strategi 2027-2031.

Metode yang dilakukan terbagi dalam dua tahap yakni tahap asesmen dan tahap pengembangan.

Strategi 2027-2031 ditargetkan disepakati Governing Council pada persidangan IPU Maret-April 2026.

Tahap asesmen akan dilakukan mulai Juli – Oktober 2025 dengan melihat kerangka kerja strategis saat ini. Proses akan mengkaji relevansi, efektivitas, koherensi, efisiensi dan indikasi awal dari dampak atas pelaksanaan strategi IPU.

Pengkajian akan meliputi beragam aspek kerja IPU yakni sisi politik, program, komunikasi, penguatan dan efektivitas kelembagaan.

Sementara tahap penyusunan strategi baru dimulai pada Oktober 2025 – Maret / April 2026.

9. *Future IPU meetings*

Sekretariat menyampaikan beberapa perubahan agenda kegiatan IPU ke depan. Secara prosedur, seluruh agenda kegiatan IPU perlu disepakati oleh Governing Council yang dihelat setiap IPU Assembly. Namun, beberapa hal mendesak yang terkait teknis penyelenggaraan ataupun tawaran tuan rumah untuk pertemuan dalam waktu singkat, tidak dapat menunggu Governing Council.

Sekjen IPU menyampaikan Parlemen Turkiye siap untuk menjadi tuan rumah IPU Assembly ke-152 di Istanbul pada 15-19 April 2026. Kendati demikian persiapan teknis untuk hal tersebut perlu dilakukan sejak saat ini, dengan demikian, Sekjen mengusulkan agar Komite Eksekutif dapat menyepakati dan memberi mandat Sekretariat IPU untuk menindaklanjuti proses persiapan dimaksud.

Selain itu, IPU juga akan terlibat dalam penyelenggaraan Forum for Parliamentarians at the 3rd UN Conference on the Landlocked Developing Countries (LLDCs) di Awaza, Turkmenistan, 5-8 Agustus 2025. Sekjen mengharapkan persetujuan Komite Eksekutif sebagai pengganti Governing Council dalam hal ini.

Kedua agenda tersebut disepakati Komite Eksekutif.

Delegasi Indonesia menyatakan perlunya Sekretariat IPU untuk melakukan pembaruan agenda secara cepat agar persetujuan Komite Eksekutif dapat

dilakukan melalui berbagai medium. Delegasi Yunani mengusulkan IPU untuk menjajaki pertemuan parlemen di sela-sela UN Ocean Conference.

Di sisi lain, para anggota Komite Eksekutif mempertanyakan rencana penyelenggaraan Parliamentary Meeting at COP30 di Belem, Brazil, November mendatang yang menurut informasi terdengar akan berada berdekatan dengan jalur sungai Amazon. Proses menuju lokasi dan adanya rencana mendirikan tempat penginapan dengan mendatangkan kapal pesiar, hotel di kapal, hingga pembangunan masif di dekat sungai Amazon.

Delegasi Prancis menyatakan langkah tersebut terkesan bertentangan dengan semangat aksi iklim dari COP30. Para anggota Komite Eksekutif menyampaikan pandangan perlunya pendalaman terkait hal tersebut oleh Sekretariat IPU.

C. PERTEMUAN LAINNYA

1. Perayaan Hari Internasional Parlemen

Selain pertemuan Komite Eksekutif IPU, para Delegasi juga mengikuti agenda perayaan Hari Internasional Parlemen yang jatuh pada 30 Juni. Perayaan tersebut dilakukan pada Senin, 30 Juni 2025 di Markas Komite Olimpiade Internasional (International Olympics Committee/IOC) di Ancient Olympia, Yunani.

Lokasi tersebut dipilih sebagai simbol adanya multilateralisme, inklusivisme, dan diplomasi damai dalam olahraga, yang sejalan dengan peran-peran yang dilakukan diplomasi parlemen dan IPU. Tema utama perayaan tersebut adalah kesetaraan gender yang sejalan dengan kampanye IPU tahun 2025 tentang [Achieving gender equality, action by action](#) yang didesain untuk mengembangkan institusi yang sensitif gender. IPU juga merilis 10 aksi untuk kesetaraan gender yang berisi langkah-langkah yang dapat dilakukan parlemen agar dapat sensitif gender.

2. Pertemuan dengan Antipollution V Group

Delegasi juga melakukan pertemuan singkat dengan perusahaan lingkungan asal Yunani Antipollution, yang fokus pada penanganan limbah pada Selasa, 1 Juli 2025. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbesar di Yunani dan kawasan mediteranian.

Anggota Parlemen Yunani, Hon. Dionysia menyampaikan perusahaan tersebut berkeinginan bertemu dengan otoritas Indonesia untuk menyatakan

minatnya dalam bekerjasama terkait pengelolaan limbah berkelanjutan, utamanya, untuk kawasan pelabuhan. Sedianya ia akan bertemu di Paris pada UN Ocean Conference Juni 2025 dengan Delegasi Pemerintah Indonesia, namun, hal tersebut tertunda karena agenda personal.

Jajaran Pimpinan Antipollution dan V Group (induk perusahaan) menyampaikan informasi mengenai perusahaannya yang telah berpengalaman puluhan tahun dalam pengelolaan limbah berkelanjutan di pelabuhan. Baru-baru ini Antipollution bekerjasama dengan Otoritas Kanal Suez (Suez Canal Authority/SCA), menyepakati pengelolaan berkelanjutan akan limbah padat dan cair dan membentuk perusahaan patungan baru ([antipollution egypt](#)) dengan nilai investasi hingga US\$ 150 juta. Perusahaan baru tersebut menyediakan layanan *Port Reception Facilities* (PRF) untuk pengumpulan limbah cair dan padat dari kapal yang melintas di terusan Suzes. Proses tersebut sejak awal diklaim zero carbon.

Antipollution berharap dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai prospek kerja sama yang dapat dikembangkan terkait pengelolaan limbah terpadu dan berkelanjutan dalam kawasan pelabuhan maupun maritim berkelanjutan dengan pemangku kepentingan di Indonesia dalam area bisnis terkait utamanya di kawasan pelabuhan (baik kementerian maupun BUMN terkait). Profil perusahaan terkait terlampir.

III. **KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

1. Diskusi dalam rapat Komite Eksekutif IPU berlangsung mendalam dan menyentuh aspek internal IPU;
2. Komite Eksekutif menyepakati adanya rencana untuk melibatkan pakar resolusi konflik dan isu perdamaian untuk menguji beragam mekanisme krisis yang dimiliki IPU, melanjutkan status pembahasan keanggotaan Parlemen Niger dan Venezuela seiring perkembangan domestik di masing-masing negara;
3. Komite Eksekutif juga menyepakati agar Sekretariat melanjutkan pembahasan teknis penyelenggaraan IPU ke-152 dengan Turkiye yang dijadwalkan berlangsung pada 15-19 April 2026 di Istanbul, Turkiye dan menyetujui secara darurat pelaksanaan Forum for Parliamentarians at the 3rd UN Conference on the Landlocked Developing Countries (LLDCs), 5-8 Agustus 2025.
4. Komite Eksekutif juga memberi mandat Sekretariat untuk menyatakan kekhawatiran emisi karbon berlebihan dalam penyelenggaraan pertemuan parlemen pada COP-30 apabila diselenggarakan di Belém, Brasil mengingat lokasi dekat dengan Sungai Amazon dan penginapan terbatas. Agenda pertemuan IPU ke depan terlampir.
5. Pertemuan Konferensi Ketua Parlemen ke-enam akan menghadirkan Michael Douglas, UN Messenger of Peace sekaligus aktor film Hollywood. Sesi inovatif berupa pertemuan dengan organisasi masyarakat sipil juga akan berlangsung dalam konferensi itu.
6. IPU juga merilis 10 aksi untuk kesetaraan gender yang berisi langkah-langkah yang dapat dilakukan parlemen agar dapat sensitif gender (dokumen terkait dapat ditemukan [di sini](#)) di sela-sela perayaan Hari Internasional Parlemen yang jatuh pada 30 Juni.
7. Perusahaan Lingkungan dari Yunani yang merupakan salah satu perusahaan terkenal dan terbesar di Yunani dan kawasan mediterania, Antipollution dari V Group memiliki minat untuk berbisnis di Indonesia dan mengharapkan dapat bertemu pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Laut dan BUMN Pelindo.

B. Saran

1. DPR RI melalui BKSAP untuk dapat tetap mempertahankan keanggotaan di Komite Eksekutif hingga mandat berakhir pada Oktober 2027.
2. BKSAP DPR RI untuk dapat mempersiapkan partisipasi aktif dan keterlibatan substantif dalam pertemuan-pertemuan IPU berikutnya sesuai jadwal yang telah tersedia.
3. DPR RI untuk dapat melakukan pendalaman mengenai dokumen 10 aksi untuk kesetaraan gender.
4. BKSAP DPR RI untuk dapat menjembatani komunikasi lanjutan antara perusahaan lingkungan Yunani dengan pemangku kepentingan yang terkait.

Ketua Delegasi

ttd

Dr. Mardani Ali Sera



LAMPIRAN



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

296th session of the Executive Committee and related meetings Olympia and Athens, Greece Saturday, 28 June – Tuesday, 1 July 2025



Provisional programme

Saturday, 28 June, 2025: *Delegates arrive in Athens*

- 15:00 Gather at Athens International Airport Eleftherios Venizelos Airport (ATH). Depending on arrival times, group transfers will be arranged – exact meeting point to be confirmed. Direct transfer to Olympia and the hotel Aldemar Olympian Village (Estimated arrival 19:00 – travel time about 3.5 hours)
- 21:30 Welcome reception and light dinner at the hotel (Aldemar Olympian Village)

Sunday, 29 June, 2025: *At the Aldemar Olympian Village*

- 09:30-12:30 Meeting of the Executive Committee
- 12:30-14:00 Lunch
- 14:00-17:00 Continuation of the meeting of the Executive Committee
- 21:00-23:00 Gala Dinner

Monday, 30 June 2025

- 09:30 Departure from the hotel
- 10:00-11:00 Guided tour of Museum of Ancient Olympia
- 11:00-13:00 Celebrations to mark the International Day of Parliamentarism and the 136th anniversary of the IPU
Venue: International Olympic Academy in Olympia
- 13:00 **Lunch:** *Venue to be confirmed*
- 20:30 **Dinner:** *Venue to be confirmed*

Tuesday, 1 July 2025: *Visit of the Hellenic Parliament and departure*

- 09:30 Departure for the Hellenic Parliament in Athens
- 13:00 Arrival at the Hellenic Parliament
- 13:30 Meeting with the President of Parliament, Mr. Nikitas Kaklamanis, and the members of the national IPU delegation
Guided tour of the Parliament
- 14:30 Official lunch hosted by the President of the Parliament (*Venue to be confirmed*)
- 16:00 Departure of delegates for the Athens International Airport (Eleftherios Venizelos)



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.



Executive Committee
Item 10

EX/296/10-P.1
25 June 2025

Future inter-parliamentary meetings

ASSEMBLIES

Approved by the Governing Council:

19 – 23 October 2025
GENEVA
Switzerland

151st Assembly and related meetings

To be approved by the Governing Council:

15 – 19 April 2026
ISTANBUL
Türkiye

152nd Assembly and related meetings

United Republic of Tanzania
(Dates to be confirmed)

153rd Assembly and related meetings

SPECIALIZED AND OTHER MEETINGS

Venue and dates	Policy goal	Event title	Budget
2025 in-person meetings			
<i>Sevilla (Spain)</i> 2 July	Sustainable development for all	Side event at the 4th International Conference on Financing for Development (30 June – 3 July)	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>New York (USA)</i> 22 July	Sustainable development for all	Parliamentary Forum at the 2025 UN High-Level Political Forum on Sustainable Development (14 – 23 July)	Approved by the Governing Council Funding from regular budget
<i>Geneva (Switzerland)</i> 28 July	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	15th Summit of Women Speakers of Parliament, prior to the Sixth World Conference of Speakers of Parliament	Approved by the Governing Council Funding from regular budget
<i>Geneva (Switzerland)</i> 29 – 31 July	Climate change; democracy, human rights, gender equality and youth participation; peace and security; sustainable development for all	Sixth World Conference of Speakers of Parliament	Approved by the Governing Council Funding from regular budget
<i>Awaza (Turkmenistan)</i> 4 August	Climate change; democracy, human rights, gender equality and youth participation; peace and security; sustainable development for all	Forum for Parliamentarians at the Third United Nations Conference on the Landlocked Developing Countries (LLDC3 – 5 – 8 August)	To be approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Quy Nhon (Viet Nam)</i> 10 – 12 September	Peace and security	Second Science for Peace Parliamentary Meeting on Regulating Artificial Intelligence: Ethics and the IPU Charter	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Lima (Peru)</i> 11 – 14 September	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	Eleventh Global Conference of Young Parliamentarians	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Geneva (Switzerland)</i> 16 September	Sustainable development for all	55th session of the Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO	Approved by the Governing Council Funding from regular budget

Venue and dates	Policy goal	Event title	Budget
2025 in-person meetings (continued)			
<i>Geneva (Switzerland) September (Dates to be confirmed)</i>	Sustainable development for all	Parliamentary session on the occasion of the WTO Public Forum (17 – 18 September)	Approved by the Governing Council Funding from regular budget
<i>Dakar (Senegal) September (Dates to be confirmed)</i>	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	Workshop for members of Parliamentary Human Rights Committees from French-speaking countries that have recently or will soon be reviewed by the Human Rights Council	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Kleinmond (South Africa) 1 – 3 October</i>	Sustainable development for all	11th G20 Speakers' Summit (P20)	Approved by the Governing Council Funding from regular budget
<i>Doha (Qatar) 4 – 6 November</i>	Sustainable development for all	Parliamentary Meeting at the Second World Summit for Social Development (WSSD2)	To be approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Brazil 15 – 16 November</i>	Climate change	Parliamentary Meeting at COP30 (10 – 21 November)	Approved by the Governing Council Funding from carbon offset
<i>Thailand 25 – 26 November</i>	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	Regional Conference on the Elimination of Violence against Women in the Asia-Pacific region	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Kuala Lumpur (Malaysia) 28 – 30 November</i>	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	Meeting on AI policy and governance (title to be confirmed). Jointly organized by IPU, CPA and UNDP	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Philippines (Dates to be confirmed)</i>	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	Regional seminar on promoting the rights of the child for the parliaments of the East and South Asia region	Approved by the Governing Council Funding from regular budget
<i>Tajikistan (Venue and dates to be confirmed)</i>	Sustainable development for all	SDG regional seminar for the parliaments of the Eurasia Group	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Vienna (Austria) (Dates to be confirmed)</i>	Peace and security	High-level seminar for parliamentarians from countries that have not yet joined the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>United Arab Emirates (Venue and dates to be confirmed)</i>	Sustainable development for all	Regional seminar for parliamentarians and parliamentary staff from Gulf and African Countries, co-organized with the WTO	Approved by the Governing Council Funding from regular budget
<i>Beijing (China) (Dates to be confirmed)</i>	Sustainable development for all	Seventh interregional seminar on the SDGs	Approved by the Governing Council Funding from external sources

Venue and dates	Policy goal	Event title	Budget
2025 in-person meetings (continued)			
<i>Geneva (Switzerland) (Dates to be confirmed)</i>	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	Global conference on migration and human rights	Approved by the Governing Council Funding from regular budget
<i>Venue and dates to be confirmed</i>	Peace and security	Regional seminar for parliamentarians from Africa on the promotion of Nuclear Security instruments (CPPNM, 2005 amendment and ICSANT)	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Venue and dates to be confirmed</i>	Climate change	Regional seminar for parliaments of the Western Balkans on climate action	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Venue and dates to be confirmed</i>	Climate change	Regional seminar for African parliaments on climate change and reducing methane emissions	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Venue and dates to be confirmed</i>	Sustainable development for all	Regional conference for European parliaments on global health security	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Venue and dates to be confirmed</i>	Peace and security	Third Global Parliamentary Summit on Countering Terrorism and Preventing Violent Extremism	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Venue and dates to be confirmed</i>	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	World e-Parliament Conference	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Venue and dates to be confirmed</i>	Peace and security	Regional seminar for parliamentarians from the South Pacific Islands on the promotion of nuclear security instruments (CPPNM, 2005 amendment and ICSANT)	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Venue and dates to be confirmed</i>	Peace and security	Regional seminar on countering terrorism and violent extremism for the African Group	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Venue and dates to be confirmed</i>	Peace and security	Regional seminar on countering terrorism and violent extremism for the Eurasia Group	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Quarterly Venue to be confirmed</i>	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	Working together to advance women's political participation and decision-making: Series of in-person and online meetings between parliamentarians and partners in the Generation Equality Forum and/or WYDE Women's Leadership project	Approved by the Governing Council Funding from external sources

Venue and dates	Policy goal	Event title	Budget
2025 in-person meetings (continued)			
<i>Venue and dates to be confirmed</i>	Peace and security	Regional seminar on countering terrorism and violent extremism for the Group of Latin America and the Caribbean (GRULAC)	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Venue and dates to be confirmed</i>	Peace and security	Regional seminar in the Sahel region, for the implementation of the Call of the Sahel	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Venue and dates to be confirmed</i>	Peace and security	Regional seminar to promote implementation of the legal framework on counter-terrorism for the Twelve Plus Group	Approved by the Governing Council Funding from external sources
2025 virtual meetings			
<i>Virtual September (Dates to be confirmed)</i>	Human rights; peace and security	From theory to action: Parliamentarians against hatred based on religion or belief – Crafting pathways to more peaceful, inclusive and just societies (Webinar 4/4)	Approved by the Governing Council Funding from regular budget
<i>Virtual 23 July</i>	Peace and security	Virtual follow-up session to the Second Science for Peace Schools on <i>Understanding the ethics of artificial intelligence and its impact on parliamentary work</i>	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Virtual 21 August</i>	Peace and security	Webinar to commemorate the International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Virtual 26 November</i>	Peace and security	Virtual follow-up session to the Second Science for Peace Parliamentary Meeting on <i>Regulating Artificial Intelligence: Ethics and the IPU Charter</i>	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Virtual (Series dates to be announced)</i>	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	Transforming parliaments webinar series about the digital transformation of parliaments and the use of AI in parliament • 22 September: AI use case maps • Other dates to be announced	Approved by the Governing Council Funding from external sources

Venue and dates	Policy goal	Event title	Budget
2025 virtual meetings (continued)			
<i>Virtual (Series dates to be announced)</i>	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	AI and digital policy webinar series in follow-up to the October 2024 resolution on the impact of AI on democracy, human rights and the rule of law	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Virtual (Dates to be confirmed)</i>	Climate change	Global webinar on parliament's role in reducing global methane emissions	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Virtual (Dates to be confirmed)</i>	Climate change	Parliamentary dialogue on the Outcome Document for COP30	Approved by the Governing Council Funding from carbon offset
<i>Virtual (Dates to be confirmed)</i>	IPU Member Parliament outreach	Information Seminar on the structure and functioning of the Inter-Parliamentary Union for Spanish-speaking participants	Approved by the Governing Council Funding from regular budget
<i>Virtual (Series dates to be announced)</i>	Peace and security	Webinar series on promoting the Model Legislative Provisions to support the victims of terrorism	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Virtual (Series dates to be announced)</i>	Peace and security; democracy and human rights; sustainable development for all	Series of online briefings for MPs on the United Nations organized by the IPU Permanent Observer Office to the United Nations in cooperation with relevant UN departments and missions (as needed)	Approved by the Governing Council Funding from regular budget
<i>Virtual (Series dates to be announced)</i>	Peace and security	Webinar series to promote the use of human security and common security to build peace and the related toolkit with partners including the International Peace Bureau and the World Academy of Art and Science	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Virtual (Series dates to be announced)</i>	Peace and security	Webinar series on disarmament, arms control and non-proliferation, co-organized with partners including Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament (PNND) and the Parliamentary Forum for Small Arms and Light Weapons	Approved by the Governing Council Funding from external sources

Venue and dates	Policy goal	Event title	Budget
2025 virtual meetings (continued)			
<i>Virtual (Quarterly)</i>	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	Webinar series: Global empowerment series for young parliamentarians: Briefings and training courses	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Virtual (Series dates to be announced)</i>	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	Webinar series on gender equality and women's empowerment	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Virtual (Series dates to be announced)</i>	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	Public engagement webinar series in follow-up to the 2022 IPU-UNDP Global Parliamentary Report on public engagement in the work of parliament	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Virtual (Series dates to be announced)</i>	Peace and security	Webinar series on mediation skills	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Virtual (Series dates to be announced)</i>	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	Webinar series on parliamentary development co-organized with the Centre for Parliamentary Studies and Training (CPST)	Approved by the Governing Council Funding from regular budget
<i>Virtual (Series dates to be announced)</i>	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	Webinar series on enhanced cooperation between parliaments and supreme audit institutions	Approved by the Governing Council Funding from external sources
2026 in-person meetings			
<i>Geneva (Switzerland) February 2026 (Dates to be confirmed)</i>	Peace and security	Follow-up session to the first Science for Peace School on water	To be approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>New York (USA) March (dates to be confirmed)</i>	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	Parliamentary Meeting and side events on the occasion of the Commission on the Status of Women	To be approved by the Governing Council Funding from regular budget
<i>New York (USA) (Dates to be confirmed)</i>	Peace and security and sustainable development for all	Parliamentary event at the 11th UN Multi-stakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for the SDGs (UN STI Forum)	To be approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Allan (Jordan) (Dates to be confirmed)</i>	Peace and security	Third Science for Peace School on <i>Green economy, energy and the Sustainable Development Goals</i>	To be approved by the Governing Council Funding from external sources

Venue and dates	Policy goal	Event title	Budget
2026 in-person meetings (continued)			
<i>Quy Nhon (Viet Nam) September (Dates to be confirmed)</i>	Peace and security	Third Science for Peace Parliamentary Meeting on <i>Energy and climate change</i>	To be approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>United Arab Emirates December (Venue and dates to be confirmed)</i>	Peace and security	Parliamentary Meeting to be held in conjunction with the UN Water Conference	To be approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Samarkand (Uzbekistan) (Dates to be confirmed)</i>	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	Twelfth Global Conference of Young Parliamentarians	To be approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Geneva (Switzerland) (Dates to be confirmed)</i>	IPU Member outreach	Information seminar on the structure and functioning of the Inter-Parliamentary Union for French-speaking participants	To be approved by the Governing Council Funding from regular budget
<i>Yaoundé (Cameroon) or Geneva (Dates in early 2026 to be confirmed)</i>	Sustainable development for all	Parliamentary Conference on the WTO (PCWTO) preceded by the PCWTO Steering Committee	Approved by the Governing Council Funding from regular budget
<i>Yaoundé (Cameroon) or Geneva (Dates in early 2026 to be confirmed)</i>	Sustainable development for all	56th session of the Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO	Approved by the Governing Council Funding from regular budget
<i>Venue and dates to be confirmed</i>	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	Fourth World Summit of Committees of the Future	Approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Venue and dates to be confirmed</i>	Climate change	Parliamentary Meeting at COP31	Approved by the Governing Council Funding from carbon offset
<i>Belgrade (Serbia) (Dates to be confirmed)</i>	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	Global Conference of Women Parliamentarians 2026	Approved by the Governing Council Funding from regular budget
2026 virtual meetings			
<i>Virtual (Series dates to be announced)</i>	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	Webinar series on enhanced cooperation between parliaments and supreme audit institutions	To be approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Virtual (Series dates to be announced)</i>	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	AI and digital policy webinar series in follow-up to the October 2024 resolution on the impact of AI on democracy, human rights and the rule of law.	To be approved by the Governing Council Funding from external sources

Venue and dates	Policy goal	Event title	Budget
2026 virtual meetings (continued)			
<i>Virtual</i> <i>(Series dates to be announced)</i>	Democracy, human rights, gender equality and youth participation	Transforming parliaments webinar series about the digital transformation of parliaments and the use of AI in parliament	To be approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Virtual</i> <i>June</i> <i>(Dates to be confirmed)</i>	Peace and security	Virtual follow-up session to the Third Science for Peace School on <i>Green economy, energy and the Sustainable Development Goals</i>	To be approved by the Governing Council Funding from external sources
<i>Virtual</i> <i>November</i> <i>(Dates to be confirmed)</i>	Peace and security	Virtual follow-up session to the Third Science for Peace Parliamentary Meeting on <i>Energy and climate change</i>	To be approved by the Governing Council Funding from external sources

CIRCULAR ECONOMY SERVICES



ONTIPOLLUTION

MEMBER OF **V GROUP**

GROUP STRUCTURE



GROUP

Environmental

Energy

Non-Profit
Foundation



V GROUP COMMITTED TO ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP

V Group is dedicated to advancing environmental services in the fields of Port Reception Facilities (PRF), Waste Management, Alternative Fuel Production and Renewable Energy Sources (RES), aiming to tackle some of today's most critical environmental challenges. The Group's operations are guided by a net-zero emissions philosophy, working to minimize ecological impact through sustainable methods in every endeavor.

Aligned with high ethical and sustainability standards, V Group delivers dependable, effective services that reinforce its mission of fostering social and environmental well-being. Through consistent innovation and purposeful action, V Group remains committed to promoting a sustainable future across all sectors it serves.

›**€120m**
Revenue
per annum

›**38%**
EBITDA Margin

›**200,000m³**
Waste collected
per annum

›**20,000**
Vessels served
per annum

›**€120m**
Employed Assets

›**350**
Employees

ABOUT US

ANTIPOLLUTION IS ONE OF THE LEADING COMPANIES IN THE INDUSTRY OF WASTE MANAGEMENT AND ALTERNATIVE FUEL PRODUCTION.

The Company operates a hazardous waste processing unit for the production of alternative fuel and alternative raw materials. The plant is capable of treating 30.000 t of HW and covers an area of 3,300 m². Its unique design and innovative technologies, constitute it as one of the most modern and competitive hazardous waste management units in South-eastern Europe. In an adjacent area of the same facility, there is a unit dedicated to the reception and storage of hazardous waste.

ANTIPOLLUTION also operates a Refuse Derived Fuel & Solid Recovered Fuel (RDF/ SRF) production facility, located in Aspropyrgos. Our SRF production facility consists of a storage area, production area and a fully equipped Laboratory. Our intention is to further optimize and modernize its operation, as well as increase and improve the production of RDF.

ANTIPOLLUTION is a major contributor to the Greek Waste Management Industry, constantly developing initiatives whose goal is to improve health and safety standards.

The Company is a member of V Group, which is a robust Group of Companies with a strong presence and continuous growth in Waste Management, Renewable Energy Sources and Financial Investments.

Keeping a close eye on international developments in the environmental sector, ANTIPOLLUTION is constantly evolving and remain dedicated to providing environmental services of the highest standards, preserving its commitment to sustainable operations and environmental protection.



SERVICES

AT ANTIPOLLUTION WE ARE CONSTANTLY WORKING TOWARDS A SUSTAINABLE FUTURE.

Our integrated waste management services reflect our dedication to Zero Waste. Using the latest technologies, we treat all kinds of waste effectively. We invest in advanced technologies in order to reduce the waste directed for disposal, in accordance with relevant guidelines set by the EU. We promote and implement recycling and recovery, through a separation process in our facilities, in order to produce alternative fuel from Hazardous and non-Hazardous waste streams



AT A GLANCE

REGARDING THE PORT RECEPTION FACILITIES OF SHIP GENERATED WASTE, SHIP REPAIRS WASTE AND CARGO RESIDUES, WE OFFER:

A

Collection on land using specialized equipment.

B

Collection at sea by dedicated vessels.

C

Waste processing.

D

Hazardous waste management.

E

Collection, transportation and final disposal.



ANTIPOLLUTION HOLISTIC APPROACH TO ENVIRONMENTAL SERVICES

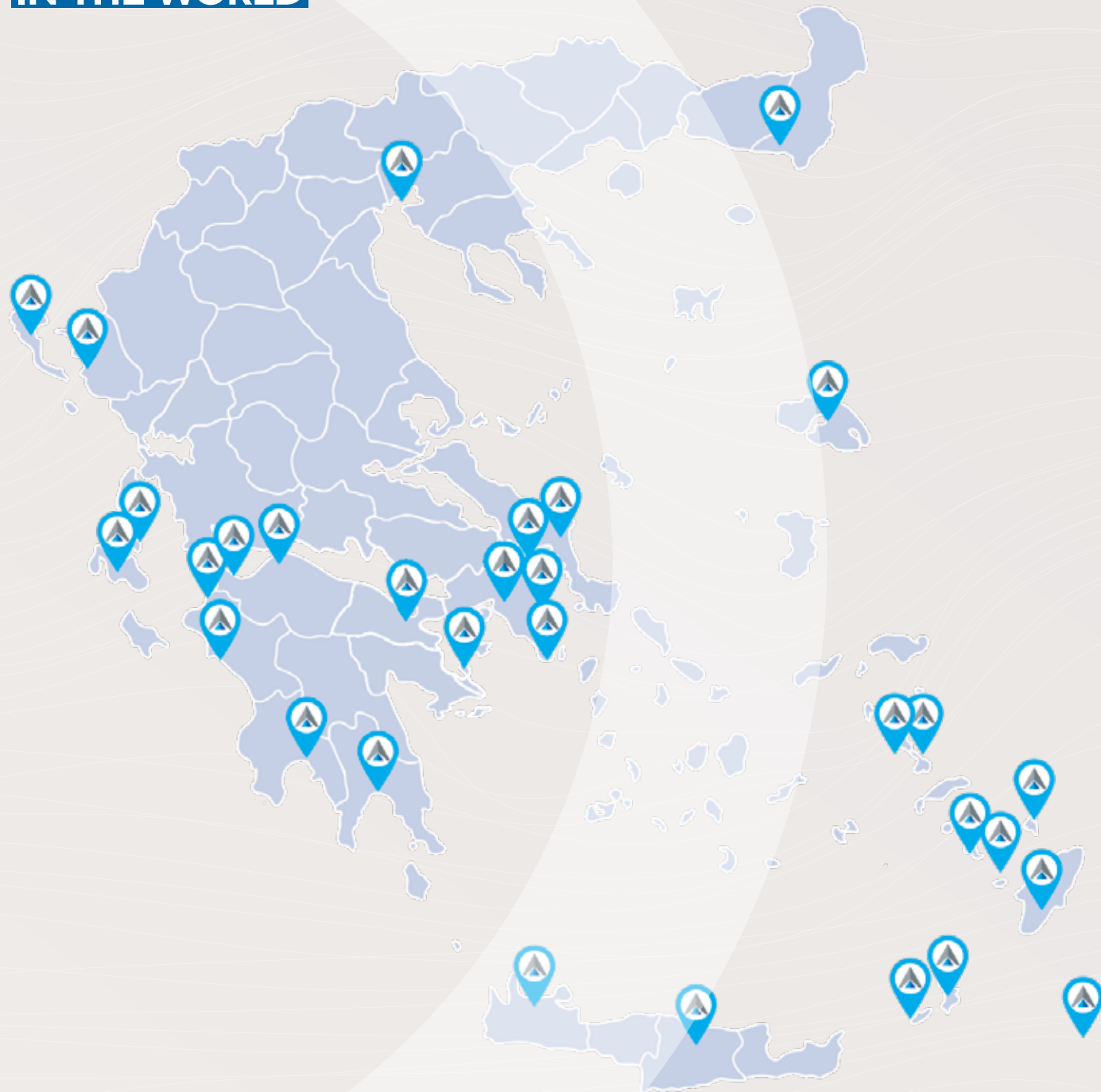
Antipollution stands out as the premier provider of Port Reception Facilities (PRF) in the Eastern Mediterranean and is ranked among the top 10 companies globally in the industry. It combines decades of experience with advanced, environmentally focused solutions to address the needs of today's maritime and port sectors.

With almost 80 years in operation, Antipollution draws on extensive knowledge and a commitment to environmental protection to promote sustainable practices. The company utilizes the latest available technologies and equipment, designed to handle the complexities of waste treatment effectively and responsibly. By adopting a net-zero emissions philosophy, Antipollution S.A. actively works to minimize environmental impact across all aspects of its operations, supporting cleaner, safer oceans and ports.

Antipollution continues to support a sustainable future for the maritime industry, building on a legacy of reliability and environmental responsibility.

**TOP PRF PROVIDER
IN THE EASTERN
MEDITERRANEAN**

**ON THE TOP 20
PRF PROVIDERS
IN THE WORLD**



**WE OPERATE
IN THE MAJOR PORTS
OF GREECE,
MANY PRIVATE MARINAS
& TERMINALS**



OUR SERVICES PORT OPERATION SERVICES

PORT RECEPTION FACILITIES FOR SOLID SHIP-GENERATED WASTE AND CARGO RESIDUES

Our company provides Port Reception Facility services for Ship-Generated Waste, Cargo Residues (MARPOL73/78, Annexes I, III, V, VI) and Ship Repair Waste Management sediments from shipyards, repair zones, anchorage etc. We also take on the management of waste produced in ports, harbors, marinas and offshore installations.

We serve the largest Greek ports and numerous private facilities nationwide, while our in-depth experience combined with our highly qualified and impeccably trained personnel, guarantee the quality of the services we provide.

At Antipollution we are fully licensed and capable of implementing environmental practices of the highest standards for waste management, always in adherence to our zero – waste approach and the circular economy model.

Following each waste disposal operation, our clients receive all relevant documentation in adherence to local environmental legislation.

ANTIPOLLUTION EGYPT THE EXCLUSIVE PORT RECEPTION FACILITIES PROVIDER OF SUEZ CANAL

Suez Canal Authority (SCA) and V Group of Companies agreed to join forces and create Antipollution Egypt, an innovative company that will add value to the already established equity of Suez Canal.

The corporate scheme includes shareholder Mr. Eric Adam, a Greek-Egyptian entrepreneur. The 193.3-kilometer-long canal under the distinguished leadership of the Suez Canal Authority (SCA), has aligned its efforts with one of the most proficient companies in the field of Port Reception Facilities (PRF) worldwide, the Greek Antipollution S.A., member of V Group of Companies, with over 75 years of expertise in PRF services.

Based on the investment that is projected to reach a value of up to 150 million USD, the newly established company will deliver an efficient and pioneering Port Reception Facilities (PRF) service for collection of solid and liquid waste from vessels passing through the Suez Canal, via the usage of custom – made eco vessels, built in Egyptian Shipyards. In addition, the company will empower circular economy and will focus on “waste valorization” while creating and providing the opportunity to enjoy social, economic, and environmental benefits on a local and national level, establishing a strong corporate impact.

Moreover, the main objective of the project is to implement a ZERO WASTE strategy from the first day of operations and maintain a ZERO-CARBON footprint throughout the company’s operations.



OUR SERVICES

EMERGENCY RESPONSE SERVICES

ANTIPOLLUTION PROVIDES IMMEDIATE, EFFECTIVE AND RELIABLE SOLUTIONS CONCERNING EMERGENCY RESPONSE SERVICES AROUND THE WORLD.

OIL SPILL RESPONSE

Antipollution provides active, 24/7 response services to combat oil spills, wherever in the world they may occur. Our oil spill response experts are highly trained and familiar with all the stages of waste management, while our vessels are equipped with state-of-the-art oil containment and recovery equipment to protect marine environment efficiently.

DESTROYED / DISTRESSED CARGO MANAGEMENT

Our company provides comprehensive cargo management solutions, for ship cargoes that are partially or totally damaged, contaminated or abandoned. We undertake the assessment plan, recovery, collection, transportation and disposal of cargo, in full compliance with European and national legislation.

WRECK REMOVAL WASTE MANAGEMENT

We have an excellent team with great experience in handling and managing hazardous materials on-board and cutting edge equipment to undertake the most complex environmental protection services during salvage operations worldwide. Our company has been involved in major projects, ensuring proper management and minimal damage to environmental resources.

SEA SURFACE CLEANING

Our modern vessels are equipped with a special hydraulic mechanism for the collection of floating waste. Their draught is particularly shallow, so they can perform work even in shallow waters and can access the most difficult areas, thus cleaning all types of waste from the sea surface, such as wood, plastic and algae.

SHIP-TO-SHIP (STS) TRANSFER

Transferring cargo from ship-to-ship is a demanding process, that requires a combination of state-of-the-art equipment, a highly experienced personnel and an in depth understanding of the marine environment. Our company is able to provide comprehensive solutions for all ship-to-ship requirements, in cooperation with significant partners and in line with all applicable environmental standards.

OUR EQUIPMENT

ANTIPOLLUTION OWNS A FLEET OF SPECIALIZED AND PROPERLY LICENSED VEHICLES, AS WELL AS SOPHISTICATED TECHNOLOGY FOR EMERGENCY RESPONSE SERVICES AND WASTE MANAGEMENT PROJECTS.

- Refuse Collection Vehicles
- Hook Lifts & Crane Trucks
- Skip Loaders
- Grabble Loader Trucks and Tank Trucks
- Containers and Compactor Types
- Loaders, Sweepers, etc.
- Pumping Systems for Harmful Liquid Substances
- Pumping Systems for Petroleum
- UN Approved Packaging of All Types
- Machinery for Beach Cleaning
- Vessels / Self-Propelled Barges
- Towed Barges
- Submersible Pumps
- Oil Pumping Systems
- Skimmers
- Absorbent Booms
- Absorbent Pads & Inflatable Booms





HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT

ANTIPOLLUTION is fully licensed for the collection and transportation of hazardous waste, in compliance with the terms and conditions provided by National and European Legislation. Our company offers highly competitive, environmentally – friendly services, with the goal of developing long – term collaborations with its clients and contributing to a sustainable future.

The company is able to conduct sampling analyses, classification, packaging, labelling and transportation of hazardous waste from its source and/or any location in which it has been temporarily stored, to authorized facilities in Greece.

Furthermore, ANTIPOLLUTION is capable of undertaking the entire process of the trans-boundary movement of hazardous waste to authorized final disposal facilities based in the EU, according to European Legislation (EC 1013/2006) and the Basel Convention.



NON HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT

ANTIPOLLUTION invests in advanced technologies, in order to reduce the amount of waste led to landfills – in respect to relevant guidelines set by the EU, making use of the newest techniques and best practices available.

Our company recycles and recovers materials including paper, plastic, wood, metal etc., using a separation process in its state-of-the-art facilities. The residue goes through a different process, by which it is transformed into alternative fuel (RDF). Thanks to continuous research on advanced technologies, we are able to offer solutions for the collection, transportation and treatment/or final disposal, of all kinds of waste.

ANTIPOLLUTION has obtained all relevant permits for the management of waste streams and is fully compliant with both Greek and European Legislation.



ALTERNATIVE FUEL PRODUCTION

Apart from recycling, ANTIPOLLUTION treats non – recyclable residue fractions, in an effort to maximize recovery output and minimize waste disposal.

The residue is directed to ANTIPOLLUTION's state-of-the-art processing plants and transformed into alternative fuel of high calorific value, through a sophisticated treatment process. Once the process is complete, SRF and RDF are customized and made available to each of our licensed recipients.

As a result of its constant growth and ever – increasing investments, ANTIPOLLUTION is able to produce alternative fuel from hazardous waste, enhancing its zero-waste philosophy, minimizing the amount of waste sent to landfills and promoting the replacement of fossil fuels. All of the above, stand in line with the company's prioritization of environmental protection and its dedication to providing sustainable waste management services of the highest quality.



RECOVERY AND RECYCLING

Recycling is one of ANTIPOLLUTION's main business operations, underlining its deep environmental commitment. Recycling contributes to the conservation and maintenance of vital raw materials and is key to the preservation of fragile ecosystems.

ANTIPOLLUTION uses recovery processes to generate new products from recycled materials, effectively reducing the amount of waste residue sent to landfills. This is especially important once we take the saturation of landfills into account, not to mention their alarming contribution to methane emissions worldwide.

The Company consistently promotes the benefits of recycling, highlighting its key role in the protection of our planet. To this end, the company shares its expertise with each of its clients, always adhering to the specific requirements of each of the materials at hand, which are then separated, recovered and utilized in its processing Plants.



INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT

Industrial waste refers to any type of waste that is a product of industrial activity. This includes several types of materials that are discarded during the manufacturing and production process (chemical waste, industrial solid waste and toxic waste).



DISTRESSED CARGO & OFF-SPECIFICATION PRODUCTS HANDLING/FINAL DISPOSAL

Using the latest relevant equipment our company is able to facilitate the handling of products that fall out of specifications or have expired, either within, or beyond our facilities. Waste that is generated through this process is transported to the licensed final recipient.



SOIL REMEDIATION

Decontamination services by chemical reaction, disinfection, or physical removal. Tailor made developments of “in-situ” and “ex-situ” decontamination projects. ANTIPOLLUTION recruits waste management specialists and experienced field engineers who can provide high level monitoring and supervision, supporting with detailed technical reporting complex and demanding remediation projects.

FACILITIES

RITSONA PLANT

HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT

ANTIPOLLUTION operates a hazardous waste processing unit for the production of alternative fuel and alternative raw materials. The plant covers an area of 3,300 m² and is capable of treating up to 30.000 t of HW. Its unique design makes it one of the most modern and competitive hazardous waste management units in South-East Europe. In an adjacent area of the same facility, there is a unit dedicated to the reception and storage of hazardous waste. The state-of-the-art equipment in ANTIPOLLUTION's facilities, paired with its specialized staff and their deep knowledge and experience in matters of waste management and environmental protection, make the company an important asset in waste management projects both in Greece and abroad.

The aim of the new unit is an integrated WM scheme, which will provide the best available techniques and methods of waste treatment, utilization, and recovery.

ANTIPOLLUTION's activities are focused on the reduction of carbon dioxide emissions, through the replacement of conventional fuels with alternative ones, as well as the increase of landfills' life expectancy.



FACILITIES

ASPROPYRGOS PLANT

NON HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT

ANTIPOLLUTION operates a Refuse Derived Fuel & Solid Recovered Fuel (RDF/SRF) Production Facility, which is located South-West of the city of Athens. The company is responsible for the handling of the port and vessel waste, as well as Commercial and Industrial (C&I) waste.

Our SRF Production Facility consists of a storage area, production area and a fully – equipped laboratory. Our intention is to further optimize and modernize its operation, as well as increase and improve the production of RDF. ANTIPOLLUTION is upgrading the existing installation, through the purchase of new, state-of-the-art equipment, which is compatible with the type and origin of infeed materials, providing flexibility for a throughput increase.



OUR MEMBERSHIPS

NATIONAL MEMBERSHIPS



Hellenic Marine Environment Protection Association



Greek Association of Environmental Protection Companies



Federation of Recycling and Energy Recovery Industries and Enterprises



Hellenic Solid Waste Management Association



Hellenic Federation of Enterprises



Quality Net Foundation



Athens Chamber of Commerce & Industry



Diversity Charter



Hellenic Shortsea Shipowners Association



Hellenic Shipowners Association of Tugs, Salvage, Antipollution and OSVs



Union of Cruise Ship Owners & Associated Members



SYN-ENOSIS



Hellenic Chamber of Shipping



Union of Hellenic Chambers of Commerce



Hellenic-Indian Chamber of Commerce & Economy



Hellenic Italian Chamber of Athens



Piraeus Port Authority Cosco Shipping





Hellenic Chinese Chamber of Commerce Industry Tourism and Shipping



Hellenic Chinese Business Chamber



Arab-Hellenic Chamber of Commerce & Development



American-Hellenic Chamber of Commerce



Association of Industries of Central Greece



Desmos Non-Profit Foundation



Piraeus Chamber of Commerce & Industry

INTERNATIONAL MEMBERSHIPS



Euroshore



International Solid Waste Association



International Spill Control Organization



International Waste Working Group



World Human Forum



UN Global Compact



SOLIDARITY WE GIVE BACK TO THE SOCIETY

V Group of Companies is renowned for its exceptional community relations and unwavering commitment to social support. The company has established strong bonds with the communities in which it operates, recognizing that their success is intricately tied to the well-being of these communities. V Group actively engages with local residents, collaborating on various initiatives aimed at fostering positive change and sustainable development.

Through charitable contributions, volunteer programs, and partnerships with nonprofit organizations, V Group extends a helping hand to those in need, addressing pressing social issues such as education, healthcare, and environmental conservation. By nurturing a culture of social responsibility and actively supporting community-driven projects, V Group of Companies is instrumental in creating a harmonious and empowered society.



CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

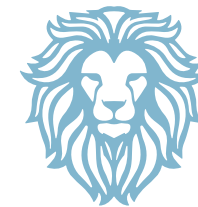
Our ethical code is inextricably linked to our company's purpose, values, business strategy and processes. We acknowledge our economic, social and environmental responsibility, as well as the significance of our promise to provide high quality services, that create added value for our customers, employees, shareholders and the wider society within which we operate.

We, at ANTIPOLLUTION, a proud member of V Group, are fully committed to our company's continuous contribution to positive change and strive to address each of the challenges we face, without compromising our values surrounding sustainability and environmental protection. This is highlighted to V Group's Sustainability Report for 2020, which presents our approach to sustainable development, performance, priorities and future objectives.

RAISING AWARENESS ABOUT THINGS THAT MATTER

An important part of our responsibility is to actively give something back. We do this through a series of charitable initiatives, which are related to community support and providing assistance to individuals with limited opportunities.

Most of these actions are carried out by the Deppy Vasileiadis (DV) Foundation, a non – profit branch of V Group, which supports philanthropic and animal rights organizations and implements programs that cultivate respect for the natural environment.



Deppy
VASILEIADIS
FOUNDATION



DISTINCTIONS AWARDS FOR OUR ZERO WASTE PHILOSOPHY

The company has been awarded with various distinctions in national and international level including Environmental Awards (2020) for Integrated Waste Management and Sustainable Business, Diamonds of the Greek Economy (2019), European Business Awards for the Environment (2018) for Products & Services, Global Business Excellence Awards (2015) for Outstanding Innovation, Waste and Recycling Awards (2015) for Recycling Business, Health and Safety Awards (2014) for Industrial Waste Management, Facilities Management Awards (2014) for Waste Management.



Antipollution Receives Environmental and Green Development Award from Athens Chamber of Commerce & Industry (EBEA)



V Group is a proud member of the most sustainable companies in Greece for 2024





ACADEMIC EXCELLENCE STRONG BONDS WITH THE ACADEMIC COMMUNITY

V Group of Companies has established strong collaborations with prestigious academic institutions such as the National Technical University of Athens and the City University of London Maritime Research Hub. These partnerships exemplify V Group's commitment to fostering innovation, research, and development within the maritime industry.

By working closely with these esteemed academic institutions, V Group aims to leverage their expertise and cutting-edge research to address the industry's evolving challenges and drive sustainable solutions. Through joint projects, knowledge sharing, and access to state-of-the-art facilities, V Group and these academic institutions are at the forefront of advancing maritime technology, safety, and efficiency.

This collaboration not only benefits V Group and the academic institutions involved but also contributes to the overall progress and advancement of the maritime sector as a whole.

R&D DEPARTMENT ADVANCING SUSTAINABLE SOLUTIONS ACROSS INDUSTRIES

The Research and Development (R&D) department at V Group of Companies is dedicated to advancing sustainable and efficient practices across various industries in the environmental sector. Supported by a team of experts and modern facilities, the R&D department focuses on developing practical solutions and optimizing processes to improve safety, efficiency and sustainability.

Through in-depth research, analysis and testing, V Group's R&D team explores emerging technologies, industry trends and regulatory standards to adapt to the evolving demands of multiple industries. Collaborations with academic institutions, industry partners, and subject matter experts foster knowledge exchange and support the development of innovative, effective solutions.

This commitment to focused research and development enhances V Group's ability to contribute meaningfully to environmental progress and operational advancements, aiming to set higher standards in each sector it serves.





FOSTERING THE NEXT GENERATION OF INNOVATORS WE INVEST IN YOUTH AND SCIENTIFIC TALENT

V Group of Companies recognizes the immense potential of young talents with scientific backgrounds and fresh perspectives. As part of its commitment to investing in the future, the company actively seeks to engage and support the youth by providing opportunities for growth and development. V Group understands that nurturing young minds is crucial for driving innovation and staying ahead in a rapidly evolving maritime industry.

Through various programs, internships, and mentorship initiatives, V Group offers a platform for young talents to gain practical experience, apply their knowledge, and contribute to the company's ongoing success. By investing in youth, V Group not only benefits from their fresh ideas and scientific expertise but also empowers the next generation to become future leaders and innovators within the maritime sector. This dedication to fostering young talent showcases V Group's commitment to nurturing innovation and driving sustainable growth for years to come.

CONTACT US

OUR PEOPLE ARE HERE TO HELP

Piraeus Tower – Floor 22
Akti Posidonos 2, Piraeus 185 31, Greece
T: +30 210 42 92 426
F: +30 210 42 92 710
E: info@antipollution.com
www.antipollution.com

 Antipollution

 [antipollution_sa](https://www.instagram.com/antipollution_sa)

 Antipollution SA

EMERGENCY RESPONSE NUMBERS

+30 695 72 10 477
+44 7341 923 809

E: emergencyresponse@antipollution.com
www.antipollutionemergencyresponse.com



@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr



Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY
COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF
REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)

Email: biro_ksap@dpr.go.id

Phone: (62-21) 5715813

ksap.dpr.go.id